

**RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS KOPERASI,UMKM
DAN PERDAGANGAN**

DAFTAR ISI

BAB I	3
P E N D A H U L U A N.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	8
EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025	8
2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun ini dan capaian renstra perangkat daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
BAB III	43
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB IV	69
PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan renja perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Renja perubahan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan meliputi perubahan / penambahan anggaran program dan kegiatan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi pelaksanaan kegiatan dan perubahan target kinerja yang akan dicapai.

Renja perubahan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan tahun 2025 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Renja Perubahan ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN Dan APBD Tahun Anggaran 2025
5. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi ranperda tentang rpjpd dan rpjmd serta tata cara perubahan rpjpd rpjmd dan rkpd
6. Peraturan kpu nomor 19 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota ulang tahun 2025
7. Kepmenkeu nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer kedaerah menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025
8. surat edaran bersama menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor 900.1.3/6629.A/SJ dan 1/MK.07/2024 tentang tindak lanjut arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2025
9. surat edaran menteri dalam negeri nomor 900.1.1.640/SJ tanggal 11 februari 2025 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rkpd dan perubahan apbd tahun anggaran 2025
10. Surat wali kota pangkal pinang nomor 900/9/bakeuda/I/2025 tanggal 13 januari 2025 perihal pemberitahuan
11. Surat wali kota pangkal pinang nomor 900/107/bakeuda/IV/2025 tanggal 21 april 2025 perihal refocusing dan efisiensi belanja pada APBD tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja perubahan adalah sebagai acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja perubahan adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja perubahan 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ini dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025

2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun ini dan capaian renstra perangkat daerah

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	
					I		II			
1	2	3	4		5		6		7 = 5+6	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	73	6.974.558.248	20	1.659.682.035			20	1659682035
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,5		20				20	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	0	25					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	1	0						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan	1	0	1					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Sartuan : %)	100	6.066.338.524	25	1.436.112.117			25	1436112117
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	47	6.066.338.524	47	1.436.112.117			47	1436112117

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	0					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	0					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	4.000.000	25	4.000.000		25	4000000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	1	4.000.000	1	4000000		1	4000000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)	0	0				0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	217.422.500	25	85.878.726		25	85878726
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	9.445.600	1	5.202.800		1	5202800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	70.540.300	1	43.263.400		1	43263400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	37.436.600	1	7.865.350		1	7865350
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	100.000.000	1	29547176		1	29547176
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan : %)	100	19.220.000	25	0		25	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	3	19.220.000				0	0

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusa Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	566.368.832	25	113.763.960			25	113.763.960
	Penyediaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	138.000.000	1	19.670.256			1	19.670.256
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	24.750.000	1	1.900.000			1	1.900.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	1	403.618.832	1	92.193.704			1	92.193.704
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	101.208.392	25	19.927.232			25	19927232
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	56.576.696	1	12.038.616			1	12038616
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	44.631.696	2	7.888.616			2	7888616
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelthara/direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	1	0					0	0
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dilindungi dan diberdayakan (Dengan Satuan:%)	80	167.858.480	20	33.493.080			20	33493080
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)	51	167.858.480	13	33.493.080			13	33493080
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha)	62	167.858.480	15	33.493.080			15	33493080
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Pelaku UMKM yang dibina (Dengan Satuan:%)	1,7	42.014.000	0.3	5.800.000			0	5800000
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:%)	20		5				5	

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Dengan Satuan : %)	7	42.014.000	2	5.800.000			2	5800000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Dengan Satuan : Unit)	300	42.014.000	50	5.800.000			50	5800000
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:persen)	0,7	82.000.000	0.2	0			0	0
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha. (Dengan Satuan:%)	8		2				2	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan (Dengan Satuan:%)	1	82.000.000		0			0	0
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	20	82.000.000	5				5	0
5.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	83,5	0						
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	0						
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dengan Satuan : Dokumen)	6	0						
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	0						
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0						
6.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan :%)	50	1.133.227.752	12	259.458.492			12	259458492
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan : %)	100	1.133.227.752	25	259.458.492			25	259458492
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	1	204.120.264	1	56.111.316			1	56111316

	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	4	929.107.488	4	203.347.176			4	203347176
7.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:%)	22,7	233.490.088	5	9.757.232			5	9757232
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dan penting minimal 12 kali dalam setahun (Dengan Satuan:%)	100	233.490.088	25	9.757.232			25	9757232
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	147.115.088	1	9.757.232			1	9757232
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	86.375.000					0	0
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:%)	39	337.000.000		0			0	0
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi dan misi dagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan(Dengan Satuan:%)	100	337.000.000		0			0	0
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	10	337.000.000					0	0
9.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%)	83	397.699.268	20	42.407.544			20	42407544
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku(Dengan Satuan:%)	5						0	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:unit)	1560	397.699.268	320	42.407.544			320	42407544
		Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina (Penggunaan UTTP dan Kesesuaian BDKT) sesuai dengan Peraturan yang berlaku(DenganSatuan:orang)	2250						0	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:Unit)	1.560	352.605.264	320	42.407.544			320	42407544
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	2.250	45.094.004					0	0

10.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern (Dengan Satuan:%)	11	0						
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan:%)	100	0						
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (Dengan Satuan:UMKM)	12	0						
11.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)	80	3.730.216.960	20	441.281.946			20	441.281.946
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	3.730.216.960	25	441.281.946			25	441.281.946
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	97.086.784		14.635.848			0	14.635.848
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	226.630.176		28.771.696			0	28.771.696
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dengan Satuan : Dokumen)	1	3.406.500.000		397.874.402			0	397.874.402
12.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Kota (Dengan Satuan : %)	100	0	25					
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) , Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) , Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	0	25					

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0					
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0					
13.	P R O G R A M PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang Masuk SIINas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:persen)	75	5.000.000		0		0	0
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	5.000.000	25	0		25	0
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0					
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0					
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000				0	0
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)								0,000	0,000
PREDIKAT KINERJA									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)								16,096	10,712
PREDIKAT KINERJA								SR	SR

Dari tabel diatas dapatkan jabarkan bahwa di triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 2.768.872.340., ada beberapa kegiatan yang telah mencapai target kinerja dan ada pula yang belum mencapai target dikarenakan pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Renstra 2024 – 2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Renstra	Target Renstra OPD		Realisasi Capaian	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi Mobil dan sepeda Motor terhadap PDRB	24,60%	24,80%	25,79%	
2	Persentase kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	12%	12%	13,43%	
3	Persentase Koperasi yang aktif	56%	59%	54,62%	
4	Persentase pertumbuhan UMKM di Kota Pangkal Pinang	1,4%	1,6%	1,12%	
5	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	250.414.660,64 US\$	262.935.393,88 US\$	1.046.854.659US\$	
6	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri di Kota Pangkal Pinang	1%	1%	79,10%	

2.3 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isi-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian Renstra (OPD).

Sebagaimana kita ketahui bahwa orientasi pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perindustrian di Kota Pangkalpinang, diperlukan adanya dukungan kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal yang mendukung kinerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang belum optimal, baik dalam memberi layanan publik maupun dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat umumnya.

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dalam upaya mendukung program dan kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi daerah sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang isinya adalah dalam upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia emas 2045, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di desa/kelurahan. Untuk itu Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang melalui Bidang Koperasi dan UMKM memfasilitasi program dari pemerintah pusat melalui **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**. Selain itu masih dijumpai adanya berbagai Permasalahan internal dan eksternal yaitu :

A. Urusan Koperasi

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- a. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) melaksanakan fungsi lembaga keuangan dengan melakukan kegiatan menghimpun dan meyalurkan dana dari anggota kepada

anggota maupun non anggota. Karena itu dalam aktivitasnya memiliki resiko yang cukup tinggi, karena sangat rentan terhadap berbagai penyimpangan. Karena itu dalam pengelolaan usaha simpan pinjam oleh koperasi harus memenuhi prinsip kehati-hatian (prudent) dengan menerapkan manajemen pengelolaan yang baik serta perlu pengawasan oleh pemerintah.

- b. Sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 1995, Usaha Simpan Pinjam Koperasi harus memiliki izin simpan pinjam sebagai salah satu aspek legalitas usaha. Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam, koperasi harus memenuhi persyaratan modal awal, kompetensi SDM pengelola, standar pelayanan dan perencanaan penghimpunan dan penyaluran dana, serta manajemen resiko yang baik.
- c. Izin usaha simpan pinjam dapat menjadi salah satu indikator kelayakan koperasi untuk melaksanakan usahanya sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan anggota dan masyarakat. Namun dalam faktanya masih banyak koperasi yang belum mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam tersebut.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a. Koperasi sebagai badan usaha bersama yang berbadan hukum, dalam tata kelolanya diatur, dibina, diawasi dan dinilai agar dapat pelaksanaan usahanya mematuhi ketentuan yang berlaku. Akan tetapi dalam faktanya masih banyak koperasi yang menyimpang dan tidak patuh pada peraturan perkoperasian sehingga dapat memperburuk citra koperasi dikalangan masyarakat.
- b. Kebanyakan pengawas internal koperasi tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara konsisten sehingga fungsi kontrol terhadap kinerja pengurus dalam melaksanakan kegiatan organisasi dan usaha koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- c. Tidak semua anggota koperasi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap praktek-praktek perkoperasian sehingga peran pemerintah dalam menjaga dan mengawasi koperasi agar sesuai prinsip dan jatidiri koperasi masih sangat diperlukan.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a. Sebagai lembaga keuangan anggota yang melaksanakan fungsi

intermediasi (menghimpun dan menyalurkan dana), KSP/USP Koperasi harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kesehatan agar dapat menjadi lembaga keuangan yang sehat dan terpercaya sehingga mampu berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap peningkatan ekonomi dan usaha anggota.

- b. Terwujudnya KSP/USP Koperasi yang sehat dan berdaya saing akan menjadi daya ungkit terhadap kebangkitan ekonomi masyarakat, khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang menjadi anggota koperasi.
- c. Adanya Pengakuan berupa predikat “Sehat” dari pemerintah akan menumbuhkan kepercayaan dan menghapus keraguan masyarakat terhadap kinerja KSP/USP Koperasi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan gairah dan motivasi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

- a. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum koperasi, tata kelola koperasi harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku agar dalam prakteknya benar-benar dapat mewujudkan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip koperasi. Untuk itu semua unsur baik pengurus, pengawas maupun anggota koperasi seharusnya memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang koperasi. Dengan demikian dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi dan usahanya, koperasi dapat menampilkan ciri dan watak yang menjadi jatidiri koperasi sebagai badan usaha yang demokratis, transparan dan akuntabel.
- b. Koperasi terbentuk dan didirikan karena adanya tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari para pendiri yang belum tentu memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi dalam mengelola koperasi, sehingga dalam pengelolaan bisnisnya belum tentu dapat berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah ekonomi yang pantas bagi anggotanya.
- c. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan itu hanya dapat dicapai secara efektif apabila dalam pengelolaan koperasi menerapkan prinsip tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance), untuk itu dibutuhkan SDM pengelola koperasi yang memiliki kompetensi sehingga mampu membangun dan mengembangkan koperasi untuk menjadi badan

usaha yang profesional dengan berdasarkan prinsip dan jatidiri koperasi.

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- a. Pengembangan kehidupan berkoperasi secara luas dikalangan masyarakat merupakan cita-cita pendiri bangsa yang telah meletakkan semangat dan keinginan untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa, maka sudah seharusnya pemberdayaan koperasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa dari pusat sampai daerah.
- b. Tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan koperasi terbentuk dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang memiliki kesadaran untuk bersatu membangun kekuatan ekonomi dengan menyatukan kepentingan bersama dalam satu wadah koperasi. Karena itu secara kapasitas koperasi masih sangat lemah dan butuh upaya pemberdayaan dan keberpihakan pemerintah untuk dapat melindungi dan memfasilitasi hingga dapat menjadi badan usaha yang mandiri.

6. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha kecil dan usaha Mikro (UMKM)

- a. Dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, UMKM memiliki kedudukan dan peran yang strategis terutama dilihat dari jumlah pelakunya yang begitu banyak dan kontribusinya dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu perlu terus diberdayakan dan dikembangkan agar stabilitas ekonomi dan sosial dapat tetap terpelihara sehingga terhindari dari kerawanan yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.
- b. Secara kuantitatif, UMKM memang mendominasi dan jumlahnya mencapai 99% dari jumlah pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, memberdayakan UMKM sama halnya dengan membangun masyarakat untuk mencapai tarap kehidupan yang lebih baik.
- c. Banyaknya jumlah UMKM tak sebanding dengan kemampuan pemerintah untuk dapat memberikan dukungan yang maksimal, karena itu dibutuhkan peran dari semua pihak untuk bersinergi, berkolaborasi dan bahu membahu dalam pemberdayaan UMKM sehingga dapat

terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada.

7. Program Pengembangan UMKM

- a. Banyak UMKM terlahir bukan karena telah memiliki semua kemampuan dan keahlian dalam berproduksi, manajerial, pemasaran dan penguasaan teknologi, tetapi lebih didorong karena adanya peluang, kemauan dan kesempatan untuk mencoba suatu usaha tertentu
- b. Perkembangan dunia usaha berjalan begitu cepat dan makin kompetitif, maka untuk dapat mempertahankan daya saingnya UMKM harus mampu berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk agar tetap dapat eksis di pasar lokal maupun global.
- c. Tidak semua UMKM memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai sumberdaya produktif yang dapat mendorong kemajuan usahanya, karena itu untuk mengaklari perkembangan UMKM dibutuhkan peran pemerintah untuk dapat menstimulasi dan memfasilitasi kebutuhan UMKM sehingga dapat meningkatkan skala usahanya.

B. Urusan Perindustrian

8. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah
9. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri :

Merupakan Program yang berisikan kegiatan

A. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang berisikan Penyusunan RPIK, Draft Raperda, sampai ditetapkannya sampai menjadi Perda tentang Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang terdiri dari pelaksanaan sub kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang melaksanakan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan:
 1. Wilayah pusat pertumbuhan industri
 2. Kawasan peruntukan industri
 3. Kawasan industri
 4. Sentra industri kecil dan industri menengah

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. Sumber daya manusia industri, meliputi:
 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi
 2. Menyelenggarakan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi
 3. Memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri
 4. Memberikan insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri
 5. Memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri
 6. Pelaksanaan Diklat Teknis Industri untuk ASN daerah
- Sumber daya alam industri:
 1. Penyediaan sumber daya alam untuk industri di daerah
 2. Penyaluran sumber daya alam untuk industri di daerah
- Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri meliputi:
 2. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri
- Pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui:
 1. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi
 2. Pengembangan sentra Industri kreatif
 3. Pelatihan teknologi dan desain
 4. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil
 5. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri. Pemanfaatan kreativitas dan inovasi tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- fasilitas non fiskal bagi

industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku. fasilitas industry

bagi

1. industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib,
2. industri kecil dan industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan,
3. perusahaan industri kecil dan industri menengah yang berorientasi ekspor,
4. industri kecil dan industri menengah yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri hijau, dan/ atau
5. perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan produk industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi. Fasilitas industri tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pelaksanaan sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) tujuan pelaksanaan dari sub kegiatan adalah

1. Melalui SIINAS menerima permohonan verifikasi teknis dalam

proses pengefektifan IUI dan IPUI, atau permohonan pemeriksaan lapangan dalam proses pengefektifan IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/ kota;

2. Melaksanakan verifikasi teknis, berupa pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan, untuk menilai pemenuhan komitmen dan kesiapan usaha dari perusahaan industri dengan IUI dan IPUI kewenangan kabupaten/ kota;
3. Menotifikasi untuk menerima atau menolak pengefektifan IUI dan IPUI kewenangan kabupaten/ kota melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS;
4. Melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen

IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/ kota;

5. Mengunggah BAP pemenuhan komitmen IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/ kota dari SIINas ke Sistem OSS

C. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota pelaksanaan sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) tujuan pelaksanaan dari sub kegiatan adalah

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di lingkup Kab/Kota dapat dilakukan antara lain dengan :

1. Kegiatan Tatap Muka (meeting) menghadirkan Narasumber
2. Melalui media cetak, media elektronik, secara virtual ataupun media sosial
3. Melalui penyediaan layanan konsultasi baik fisik (gerai/ruangan khusus) ataupun elektronik (live chat dst).

2. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Kab/Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan :

1. Kegiatan FGD, rapat, seminar, konsinyering dst melibatkan

instansi penyedia data

2. Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama
Tukar Menukar data dengan instansi penyedia data

3. Pelaksanaan survey baik melalui swakelola ataupun pihak ketiga.

3. Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Lingkup Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan antara lain dengan :

1. Swakelola melalui FGD, Rapat, Seminar, Konsinyering dll melibatkan narasumber tenaga ahli baik praktisi maupun akademisi; dan/atau

2. Pihak Ketiga, contohnya melalui Jasa Konsultansi dengan Tenaga Ahli Pengolahan Data;

10. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk penerbitan dan non perizinan perdagangan masih rendah.

b. Kurang optimalnya pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.

c. Kurangnya sinergisitas kebijakan dan regulasi antara pusat dan daerah terkait perizinan dan pengawasan.

C. Urusan Perdagangan

11. Program Sarana Distribusi Perdagangan

a. Belum optimalnya pembangunan, revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

b. Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

c. Belum tersedianya kawasan gudang yang dikelola oleh pemerintah.

12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

a. Belum optimalnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota.

- b. Belum optimalnya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
- c. Kurangnya sinergisitas terkait kelangkaan barang dan operasi pasar.
- d. Belum optimalnya pengawasan sektor perdagangan.
- e. Belum optimalnya pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
- f. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

13. Program Pengembangan Ekspor

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada daerah kabupaten/kota.
- b. Minimnya penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
- c. Belum optimalnya pengembangan produk ekspor unggulan.

14. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- a. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- b. Perlunya pelaksanaan peengujian atau pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dengan memiliki SDM pengawasan kemetrologian
- c. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaran kemetrologian

15. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- a. Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- b. Minimnya data sektor perdagangan.
- c. Belum tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

No	Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Sumber Dana	Keterangan
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)				
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN				13.354.151.924,00	12.766.144.796,00	-588.007.128,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.551.361.924,00	7.206.167.960,00	-1.345.193.964,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.551.361.924,00	7.206.167.960,00	-1.345.193.964,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah		73 70,5 Nilai Nilai	8.301.347.924,00	6.951.159.632,00	-1.350.188.292,00	APBD	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)		100	0	0	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD (Dengan Satuan : Dokumen)		1	0	0	0		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan		1	0	0	0		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Sartuan : %)		100	6.699.847.924,00	6.088.363.680,00	-611.484.244,00	APBD	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)		48	6.699.847.924,00	6.088.363.680,00	-611.484.244,00	APBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1 Laporan	0	0	0		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan		1 Laporan	0	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)		100	4.000.000,00	4.000.000,00	0	APBD	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)		1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	0		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)		10 Orang	0	0	0		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)		100	267.775.000,00	207.422.500,00	-60.352.500,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)		1	9.445.600,00	9.445.600,00	0	APBD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		1	70.892.800,00	68.040.300,00	-2.852.500,00	APBD	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)		1	37.436.600,00	37.436.600,00	0	APBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)		1	150.000.000,00	92.500.000,00	-57.500.000,00	APBD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan : %)		100	20.800.000,00	0	-20.800.000,00	APBD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)		3	20.800.000,00	0	-20.800.000,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusa Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)		100	1.189.500.000,00	550.165.060,00	-639.334.940,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		1	138.000.000,00	138.000.000,00	0	APBD	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)		1	31.500.000,00	24.750.000,00	-6.750.000,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)		1	1.020.000.000,00	387.415.060,00	-632.584.940,00	APBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)		100	119.425.000,00	101.208.392,00	-18.216.608,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)		1	39.565.000,00	56.576.696,00	17.011.696,00	APBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)		2	49.860.000,00	44.631.696,00	-5.228.304,00	APBD	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)		1	30.000.000,00	0	-30.000.000,00	APBD	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dlindungi dan diberdayakan (Dengan Satuan:%)		80	40.500.000,00	170.994.328,00	130.494.328,00	APBD	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)		51	40.500.000,00	170.994.328,00	130.494.328,00		
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Dengan Satuan : Unit Usaha)		42	0	0	0		
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha)		62	40.500.000,00	170.994.328,00	130.494.328,00		
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Pelaku UMKM yang dibina (Dengan Satuan:%) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:%)		1,7 20	72.014.000,00	42.014.000,00	-30.000.000,00		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan , Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Dengan Satuan : %)		7	72.014.000,00	42.014.000,00	-30.000.000,00		
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Dengan Satuan : Unit)		300	72.014.000,00	42.014.000,00	-30.000.000,00	APBD	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:persen) Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha. (Dengan Satuan:%)		0,7 % 8%	137.500.000,00	42.000.000,00	-95.500.000,00	APBD	

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan (Dengan Satuan:%)		1	137.500.000,00	42.000.000,00	-95.500.000,00	APBD	
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)		20	137.500.000,00	42.000.000,00	-95.500.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.802.790.000,00	5.559.976.836,00	757.186.836,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				4.102.790.000,00	1.885.381.260,00	-2.217.408.740,00		
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)		83,5	26.450.000,00	0,00	-26.450.000,00	APBD	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)		100	26.450.000,00	0,00	-26.450.000,00	APBD	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dengan Satuan : Dokumen)		6	26.450.000,00	0,00	-26.450.000,00	APBD	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)		100	0,00	0,00	0,00		
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)		1	0,00	0,00	0,00		
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan :%)		50	3.259.803.000,00	1.099.291.904,00	-2.160.511.096,00	APBD	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesua dengan yang direncanakan (Dengan Satuan : %)		100	3.259.803.000,00	1.099.291.904,00	-2.160.511.096,00	APBD	

	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)		1	3.035.803.000,00	204.120.264,00	-2.831.682.736,00	APBD	
	Fasilitas Sarana Pengelolaan Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)		4	224.000.000,00	895.171.640,00	671.171.640,00		
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:%)		22,7	239.097.000,00	225.990.088,00	-13.106.912,00	APBD	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dan penting minimal 12 kali dalam setahun (Dengan Satuan:%)		100	239.097.000,00	225.990.088,00	-13.106.912,00	APBD	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Dengan Satuan:Laporan)		1	99.200.000,00	139.615.088,00	40.415.088,00		
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)		1	139.897.000,00	86.375.000,00	-53.522.000,00		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:%)		39	350.000.000	227.000.000,00	-123.000.000,00	APBD	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi dan misi dagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan(Dengan Satuan:%)		100	350.000.000	227.000.000,00	-123.000.000,00	APBD	
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)		10	350.000.000	227.000.000,00	-123.000.000,00		

5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku(Dengan Satuan:%)		83 5	227.440.000,00	333.099.268,00	105.659.268,00		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera , Tera Ulang , dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:unit) Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina (Penggunaan UTTP dan Kesesuaian BDKT) sesuai dengan Peraturan yang berlaku(DenganSatuan:orang)		1560 Unit 2250 Orang	227.440.000,00	333.099.268,00	105.659.268,00		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:Unit)		1560 Unit	180.040.000,00	298.005.264,00	117.965.264,00		
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)		2250 Orang	47.400.000,00	35.094.004,00	-12.305.996,00		
6	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern (Dengan Satuan:%)		11	0	0	0	APBD	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan:%)		100	0	0	0	APBD	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (Dengan Satuan:UMKM)		12	0	0	0	APBD	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				700.000.000,00	3.674.595.576,00	2.974.595.576,00	DAK/APBD	
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)		80	665.000.000,00	3.669.595.576,00	3.004.595.576,00		

	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)		100	665.000.000,00	3.669.595.576,00	3.004.595.576,00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000,00	0	-5.000.000,00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000,00	101.465.400,00	96.465.400,00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dengan Satuan:Dokumen)		1	405.000.000,00	176.630.176,00	-228.369.824,00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dengan Satuan : Dokumen)		1	250.000.000,00	3.391.500.000,00	3.141.500.000,00		
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Instansi terkait		100	15.000.000,00	0	-15.000.000,00	APBD	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) , Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) , Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)		100	15.000.000,00	0	-15.000.000,00	APBD	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)		1	10.000.000,00	0	-10.000.000,00	APBD	

	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000,00	0	-5.000.000,00		
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas		75	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	APBD	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%		100	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00		
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dengan Satuan:Dokumen)		1	10.000.000,00	0	-10.000.000,00		
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000,00	0	-5.000.000,00		
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)		1	5.000.000,00	5.000.000,00	0		
				JUMLAH	13.354.151.924,00	12.766.144.796,00	-588.007.128,00		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2025 di anggaran induk, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan melaksanakan 13 (tiga belas) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan dengan pagu Rp. **13.354.151.924,00**. Untuk anggaran perubahan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mengusulkan pagu setelah reconfusing sebesar Rp. **12.766.144.796,00** yaitu untuk pelaksanaan 13 (tiga belas) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Setelah Perubahan RKPD					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(5)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangkal Pinang	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 70,5 Nilai Nilai	8.301.347.924,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangkal Pinang	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 70,5 Nilai Nilai	6.951.159.632,00	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	0	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	1 Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	1 Dokumen	0	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan	1 Laporan	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Sartuan : %)	100	6.699.847.924,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Sartuan : %)	100	6.088.363.680,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	48	6.699.847.924,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	48	6.088.363.680,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1 Laporan	0	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan	1 Laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	4.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	4.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	1	4.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	1	4.000.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)	10	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)	10	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	267.775.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	207.422.500,00	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	9.445.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	9.445.600,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	70.892.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	68.040.300,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	37.436.600,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	37.436.600,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	92.500.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan : %)	100	20.800.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan : %)	100	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	3	20.800.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	3	0	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.189.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	550.165.060,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	138.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	138.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	31.500.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	24.750.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	1	1.020.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	1	387.415.060,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	119.425.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	101.208.392,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	39.565.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	56.576.696,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	49.860.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	2	44.631.696,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	1	30.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	1	0	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang dilingungi dan diberdayakan (Dengan Satuan:%)	80	40.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang dilingungi dan Diberdayakan (Dengan Satuan:%)	80	170.994.328,00	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)	51	40.500.000,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan untuk koperasi dengan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:%)	51	170.994.328,00	

	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Dengan Satuan : Unit Usaha)	42	0	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Dengan Satuan : Unit Usaha)	42	0	
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha)	62	40.500.000,00	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha)	62	170.994.328,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Prosentase Pelaku UMKM yang dibina (Dengan Satuan:%) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:%)	1,7 20	72.014.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Prosentase Pelaku UMKM yang dibina (Dengan Satuan:%) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:%)	1,7 20	42.014.000,00	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan , Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Dengan Satuan : %)	7	72.014.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan , Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Dengan Satuan : %)	7	42.014.000,00	

	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Dengan Satuan : Unit)	300	72.014.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Dengan Satuan : Unit)	300	42.014.000,00	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:persen) Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha. (Dengan Satuan:%)	0,7 % 8%	137.500.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:persen) Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha. (Dengan Satuan:%)	0,7 % 8%	42.000.000,00	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan (Dengan Satuan:%)	1	137.500.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Desain dan Teknologi serta permodalan (Dengan Satuan:%)	1	42.000.000,00	
	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	20	137.500.000,00	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	20	42.000.000,00	
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	83,5	26.450.000,00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	83%	0,00	

	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	26.450.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase pendaftaran gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	100%	0,00	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dengan Satuan : Dokumen)	6	26.450.000,00	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dengan Satuan : Dokumen)	6	0,00	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	100		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan:%)	100	0,00	
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0,00	
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Presentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan :%)	50	3.259.803.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Presentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan :%)	50	1.099.291.904,00	

	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan : %)	100	3.259.803.000,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan : %)	100	1.099.291.904,00	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	1	3.035.803.000,00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	1	204.120.264,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	4	224.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	4	895.171.640,00	
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:%)	22,7	239.097.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Dengan Satuan:%)	22,7	225.990.088,00	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota		Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dan penting minimal 12 kali dalam setahun (Dengan Satuan:%)	100	239.097.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota		Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok dan penting minimal 12 kali dalam setahun (Dengan Satuan:%)	100	225.990.088,00	

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	99.200.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Dengan Satuan:Laporan)	1	139.615.088,00	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	139.897.000,00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	1	86.375.000,00	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:%)	39	350.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:%)	39	227.000.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase promosi dan misi dagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan(Dengan Satuan:%)	100	350.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase promosi dan misi dagang bagi produk unggulan sesuai dengan yang direncanakan(Dengan Satuan:%)	100	227.000.000,00	
	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	10	350.000.000	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	10	350.000.000	

9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat- alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku(Dengan Satuan:%)	83 5	227.440.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat- alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:%) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku(Dengan Satuan:%)	83 5	333.099.268,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera , Tera Ulang , dan Pengawasan		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:unit) Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina (Penggunaan UTTP dan Kesesuaian BDKT) sesuai dengan Peraturan yang berlaku(DenganSatu an:orang)	1560 Unit 2250 Orang	227.440.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera , Tera Ulang , dan Pengawasan		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:unit) Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi dan dibina (Penggunaan UTTP dan Kesesuaian BDKT) sesuai dengan Peraturan yang berlaku(DenganSatu an:orang)	1560 Unit 2250 Orang	333.099.268,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:Unit)	1560 Unit	180.040.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:Unit)	1560 Unit	298.005.264,00	
	Pengawasan/Penyulu han Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	2250 Orang	47.400.000,00	Pengawasan/Pen yuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	2250 Orang	35.094.004,00	

10	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern (Dengan Satuan:%)	11	0	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase peningkatan jumlah kemitraan UMKM dengan ritel modern (Dengan Satuan:%)	11	0	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan:%)	100	0	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan yang direncanakan (Dengan Satuan:%)	100	0	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (Dengan Satuan:UMKM)	12	0	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi (Dengan Satuan:UMKM)	12	0	
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)	80	665.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (Dengan Satuan:%)	80	3.669.595.576,00	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	665.000.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Laporan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	3.669.595.576,00	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	101.465.400,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	405.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	1	176.630.176,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dengan Satuan : Dokumen)	1	250.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dengan Satuan : Dokumen)	1	3.391.500.000,00	
12	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Instansi terkait	100	15.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan Instansi terkait	100	0	

	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) , Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) , Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	15.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) , Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) , Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	100	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	

	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	
13	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas	75	20.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk SIINas	75	5.000.000,00	

	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%	100	20.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%	100	5.000.000,00	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	10.000.000,00	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000,00	
				TOTAL	13.354.151.924,00				TOTAL	12.766.144.796,00	

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan ini sebagai acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025

Pangkalpinang, 2 JUNI 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM dan
PERDAGANGAN KOTA PANGKALPINANG,**



ANDIKA SAPUTRA,SH.,MH
NIP 198302082009031005